

## PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR DALAM MENGATASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ATAU PMKS (studi kasus korban narkoba/NAPZA)

**M. Farid Asyhari**

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[ridhzb@gmail.com](mailto:ridhzb@gmail.com)

**Pambudi Handoyo**

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[pambudihandoyo@unesa.ac.id](mailto:pambudihandoyo@unesa.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dengan mengambil studi kasus korban narkoba/NAPZA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil analisis data dari peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam mengatasi korban narkoba atau NAPZA adalah sebagai fasilitator yaitu bekerja sama dengan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mengidentifikasi masyarakat yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial, khususnya korban narkoba/NAPZA dengan cara penyuluhan sosial di wilayah kecamatan masing-masing. Untuk rehabilitasi selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Blitar menyerahkan kepada BLK Surabaya sebagai eksekutor seperti diberikannya keterampilan otomotif, bengkel, dan keterampilan las. Selain sebagai fasilitator, Dinas Sosial Kabupaten Blitar juga memberikan pembinaan mental dan spiritual, juga pemberian alat kerja atau modal usaha.

**Kata kunci:** Peran, Sosial, PMKS, Narkoba, NAPZA

### Abstract

*The purpose of this reseach is to know how Social Department of Blitar Regency has role in overcoming social prosperity among sociaty or PMKS by concerining on the victims of drugs or NAPZA. This reseach used fenomenology method, also used qualitative approach. qualitative research is showing descriptic and tends to se deductive analysis. Data collection technique which is used are observation, interview, and documentation. The result is knowing the role of Social Department of Blitar Regency in overcoming drugs problem is as facilitator namely in collusion with TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) to identify community that face the social welfare problem, especially narcotic victim/NAPZA with social counseling way in respectiv subdistric area. For rehabilitation, next Social Departemen of Blitar Regency submits to BLK Surabaya as executioner like given automotive skill, workshop, and welding skill. Apart from as facilitator, Social Departemen of Blitar Regency also gives mental and spiritual cultivation, also giving job tool or capital employed.*

**Key words:** Roles, Social, PMKS, Drugs, NAPZA

Universitas Negeri Surabaya

### PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan hidup dari setiap manusia. Dimana kesejahteraan sosial tersebut diperoleh dari terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dan suasana ketentraman dalam kehidupan sekitar. Namun tidak semua orang dapat mendapatkan kesejahteraan sosial tersebut. Masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masih menjadi persoalan yang kompleks di setiap daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum menjadi penjamin untuk terselesaikannya masalah PMKS ini, meskipun telah dilakukan dengan berbagai cara karena potensi

masyarakat yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial / PMKS dapat bertambah dan tidak dapat diprediksi.

Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari negara. Padahal pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat beberapa upaya untuk menganggulangi masalah kesejahteraan sosial, diantaranya meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yaitu (1) fakir miskin, (2) Lanjut Usia Terlantar, (3) Penyandang Cacat, (4) Anak Terlantar, (5) Anak Jalanan, (6) Anak Balita Terlantar dan, (7) Gelandangan dan Pengemis atau tunawisma.

Dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah angka kemiskinan sebanyak 136.760 jiwa pada tahun 2009, 135.500 jiwa pada tahun 2010, 126.950 jiwa pada tahun 2011, 121.200 jiwa pada tahun 2012, dan 119.800 jiwa pada tahun 2013. Jumlah angka kemiskinan pada Kabupaten Blitar tersebut setiap tahun sedikit demi sedikit menurun. Penurunan angka tersebut merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Sosial atau PMKS. Selain angka kemiskinan, Kabupaten Blitar juga masih mempunyai penduduk yang membutuhkan kebutuhan khusus, seperti tuna netra, cacat tubuh, bisu tuli, dan cacat mental. Dalam tahun 2011 penyandang tuna netra sebanyak 1.664 jiwa, cacat tubuh sebanyak 560 jiwa, bisu tuli berjumlah 746 jiwa, dan cacat mental berjumlah 997 jiwa. Dengan demikian masih banyak aspek atau indikator PMKS yang juga harus di selesaikan oleh Pemerintah Daerah guna untuk mensejahterkan masyarakatnya secara utuh.

NAPZA merupakan salah satu sebuah bentuk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang cukup sulit untuk diberantas. Meskipun pada akhir-akhir ini pemerintah Indonesia mulai gencar untuk melawan suatu bentuk kejahatan tersebut dengan memberikan hukuman mati kepada para pelakunya. Seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang diluar untuk pengobatan dan tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang berhak untuk diproses oleh para penegak hukum. Salah satu

contoh penyalahgunaan NAPZA tersebut adalah kasus Freddy Budiman yang telah menyelundupkan 1,4 juta butir pil ekstasi dari Hong Kong ke Indonesia. Aksi tersebut dilakukan oleh Freddy Budiman melalui dibalik jeruji besi LP Cipinang. Seperti yang telah dilansir oleh portal media online *Detik.com*, sebelumnya Freddy Budiman terlebih dahulu terlibat kasus jual beli narkoba dengan aparat Ditnarkoba Polda Metro Jaya. Untuk mendukung hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, namun penelitian terdahulu tersebut mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial secara umum. Dengan demikian penelitian ini ingin mengambil kasus secara khusus lagi, yaitu dengan mengambil kasus korban narkoba atau NAPZA. Rumusan masalah sendiri yang diambil yaitu bagaimanakah peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dalam studi kasus korban narkoba atau NAPZA. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih jauh lagi peran-peran yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial yang ada di Kota maupun Kabupaten di daerah.

Peran pemerintah oleh Dinas Sosial dalam kasus seperti ini memang berperan sangat penting. Dalam Soekanto (2007:212-213) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan tersebut mencakup tiga hal, pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan Dinas Sosial untuk mengatasi para korban penyalahgunaan NAPZA harus sesuai dengan kedudukan yang seharusnya, dalam artian di sini Dinas Sosial mempunyai norma dan nilai-nilai batasan untuk melakukan peranan dalam kedudukannya. Dinas Sosial merupakan sebuah lembaga sosial yang berada dalam naungan pemerintah. Dalam Soekanto (2007: 172-173) Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya. Lembaga kemasyarakatan diartikannya sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara

hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya. Fungsi lembaga masyarakat dapat diartikan sebagai **1.** Pedoman dalam bertindak laku dalam menghadapi masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan pokok. **2.** Menjaga keutuhan masyarakat. **3.** Merupakan pedoman sistem pengadilan sosial masyarakat.

## METODE

Jenis penelitian ini akan menggunakan metode penelitian fenomenologi. Penelitian yang berlandaskan fenomenologi melihat objek penelitian dalam satu konteks naturalnya. Peneliti kualitatif yang menggunakan dasar fenomenologi melihat suatu peristiwa tidak secara parsial, lepas dari konteks sosialnya karena satu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan pula memiliki makna yang berbeda pula. Untuk itu dalam mengobservasi di lapangan, seorang peneliti tidak dapat melepaskan konteks atau situasi yang menyertainya. Dengan kata lain, peneliti dengan menggunakan model fenomenologi menuntut bersatunya subjek penelitian dengan subjek pendukung objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan lebih dekat dengan subjek pendukung yaitu pihak Dinas Sosial Kabupaten Blitar, di mana para korban NAPZA adalah sebagai objek penelitiannya. Dengan demikian, menurut Idrus (2009:59) metode penelitian yang berlandaskan fenomenologi mengakui adanya empat kebenaran, yaitu kebenaran empiris yang terindra, kebenaran empiris logis, kebenaran empiris etik, dan kebenaran transendental. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif. Kualitatif bersifat lebih mendalam untuk menjelaskan suatu fenomena yang hadir sebagai suatu permasalahan. Penelitian kualitatif sebagai model yang dikembangkan oleh mazhab Baden yang bersinergi dengan aliran filsafat fenomenologi menghendaki pelaksanaan penelitian berdasarkan pada situasi wajar (*natural setting*) sehingga kerap menyebutnya sebagai metode naturalistik. Secara sederhana menurut Idrus (2009:23) dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan – sebagai subjek penelitian – dalam lingkungan hidup kesehariannya.

Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu wawancara. Wawancara (*deep interview*) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan secara mendalam. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke lokasi yang akan diteliti. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan data-data sekunder

untuk mendukung data primernya, yaitu seperti artikel, makalah, dokumen, atau data lain yang bersangkutan dengan tujuan penelitian untuk lebih mengenal dan memahami ketika proses wawancara dan observasi berlangsung. Teknik analisis data dari penelitian ini berupa teknis analisis data kualitatif yang menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data-data yang bersifat kuantitatif dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel persentase dan data bersifat kualitatif disajikan dalam bentuk narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam *e-book* panduan pendataan PMKS-PSKS, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Saat ini terdapat 26 jenis PMKS, yaitu:

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.	Anak balita terlantar
2.	Anak terlantar
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum
4.	Anak jalanan
5.	Anak dengan kedisabilitas
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8.	Lanjut usia terlantar
9.	Penyandang disabilitas
10.	Tuna susila
11.	Gelandangan
12.	Pengemis
13.	Pemulung
14.	Kelompok minoritas
15.	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17.	Korban penyalahgunaan NAPZA
18.	Korban trafficking
19.	Korban tindak kekerasan
20.	Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)
21.	Korban bencana alam



22.	Korban bencana sosial
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi
24.	Fakir miskin
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis
26.	Komunitas adat terpencil

Dalam penelitian ini lebih berfokus pada korban penyalahgunaan NAPZA, yaitu seseorang yang sengaja maupun tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Dalam struktur keorganisasiannya Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki beberapa bidang diantaranya, bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial, bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, dan bidang Pemberdayaan Sosial. Terkait masalah penelitian tentang “Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS (studi kasus korban narkoba/NAPZA)” didapatkan hasil dari wawancara atau *interview* dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, yaitu bahwa upaya Dinas Sosial untuk mengatasi para korban narkoba atau NAPZA adalah memandirikan korban narkoba atau NAPZA tersebut melalui diberikannya keterampilan seperti otomotif, bengkel, dan las. Dengan dibekalinya keterampilan tersebut para korban penyalahgunaan NAPZA dapat melakukan suatu tindakan yang positif dan dapat berhenti dari tindakan yang menyimpang. Dinas Sosial Kabupaten Blitar hanya sebagai penyalur atau fasilitator dari LSM ke Balai Latihan Kerja di Surabaya. Balai Latihan Kerja tersebut mempunyai MOU dengan tempat kerja atau perusahaan yang menampung para korban. Namun demikian masih terdapat para korban yang kembali dengan alasan tidak betah di Surabaya dan kemampuan serapnya tidak seperti yang diharapkan. Masalah PMKS korban narkoba atau NAPZA kemungkinan kecil untuk keberhasilannya karena menurutnya para korban termasuk anak jalanan belum memiliki kemandirian yang tetap, masih ingin bersenang-senang di jalanan dan dihantui dengan mimpi kebebasan-kebebasan. Padahal pada saat selesai pelatihan diberi alat untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, Kepala Seksi Penyandang Masalah Sosial juga memberikan pemaparan bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai penyalur untuk para korban narkoba atau NAPZA kepada Balai Latihan Kerja Surabaya atau BLK. BLK Surabaya tersebut sebagai operator rehabilitasi yang

sesungguhnya. Di sana para korban diberikan pelatihan keterampilan sebagai upaya pemandirian korban, pelatihan keterampilan tersebut antara lain pelatihan keterampilan otomotif, pelatihan keterampilan bengkel, dan pelatihan keterampilan las besi. Selain menjadi penyalur, Dinas Sosial Kabupaten Blitar juga memberikan pembinaan korban secara mental dan spiritual, dengan tujuan para korban supaya tidak terbayang-bayang dengan masa lalunya dan memiliki semangat hidup yang tinggi dan positif. Setelah para korban narkoba dan NAPZA mendapatkan pelatihan keterampilan tersebut juga mendapatkan alat kerja untuk membuka usaha di rumah masing-masing. Selain itu BLK juga mempunyai relasi dengan tempat kerja dan perusahaan-perusahaan yang dapat menampung para korban narkoba atau NAPZA tersebut jika mempunyai keterampilan yang bagus.

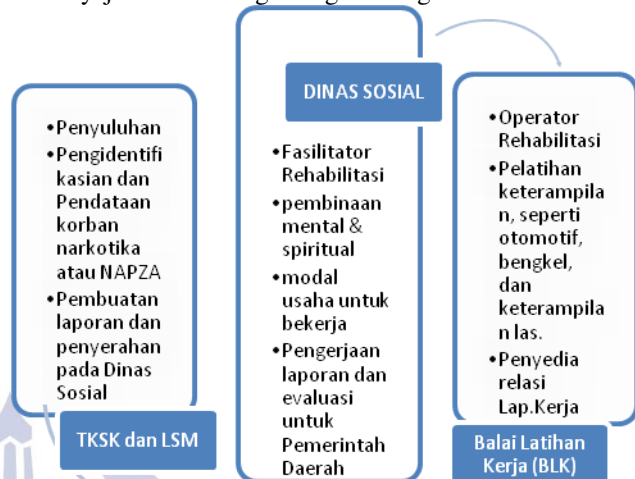
Informasi selanjutnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial di Dinas Kabupaten Blitar menjelaskan untuk menangani para korban narkoba atau NAPZA, Dinas Sosial Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan masing-masing, selain TKSK juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tugas-tugas para TKSK dan LSM tersebut ialah mengidentifikasi atau pendataan pada masyarakat yang memiliki dan menghadapi masalah kesejahteraan sosial, khususnya korban narkoba/NAPZA. Pengidentifikasian dan pendataan tersebut dilakukan dengan cara penyuluhan sosial di wilayah Kecamatan masing-masing. Selain Lembaga Swadaya Masyarakat dan TKSK, terdapat juga organisasi sosial yang juga membantu dalam proses pendataan seperti Karang Taruna setiap Desa. Setelah proses pendataan tersebut, TKSK menyerahkan data-data yang menjadi korban narkoba atau NAPZA kepada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Disini peran Dinas Sosial sebagai penyalur dan fasilitator pada Balai Latihan Kerja di Surabaya. Sebelum melepas para korban narkoba atau NAPZA ke BLK, Dinas Sosial memberikan pembekalan—pembekalan pada korban. Setelah melepas para korban ke BLK, Dinas Sosial membuat laporan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah bahwasanya program kerja yang dimiliki telah dilakukan. Dalam penanganan masalah PMKS korban narkoba dan NAPZA ini, masih mempunyai tingkat keberhasilan yang rendah. Pernyataan tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti umur para korban masih menginjak remaja yang masih memiliki pemikiran yang labil dan kurang matang. Selain itu pengaruh dari teman-teman dan lingkungan sosial

juga menjadi salah satu faktor tidak berhasilnya penanganan dari yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Balai Latihan Kerja.

Dari temuan-temuan data yang sudah didapat oleh peneliti baik data primer maupun data sekunder, dapat direduksi bahwa peran Dinas Sosial dalam mengatasi korban narkoba atau NAPZA sebagai fasilitator dari Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Kabupaten Blitar dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada Balai Latihan Kerja Surabaya. Disini Lembaga Swadaya Masyarakat dan TKSK mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi atau pendataan pada masyarakat yang memiliki dan menghadapi masalah kesejahteraan sosial, khususnya korban narkoba/NAPZA. Pengidentifikasian dan pendataan tersebut dilakukan dengan cara penyuluhan sosial di wilayah Kecamatan masing-masing. Selain Lembaga Swadaya Masyarakat dan TKSK, terdapat juga organisasi sosial yang juga membantu dalam proses pendataan seperti Karang Taruna. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Blitar juga memberikan pembinaan mental dan spiritual untuk para korban, juga alat dan modal usaha untuk bekerja.

Setelah proses pendataan, para korban narkoba atau NAPZA diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dibekali pembekalan-pembekalan tertentu, dan kemudian diserahkan kepada Balai Latihan Kerja di Surabaya untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. Selain itu Dinas sosial juga menyelesaikan laporan dan evaluasi yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah bahwasanya telah menjalankan program kesejahteraan sosial. Pada Balai Latihan Kerja para korban narkoba atau NAPZA mendapatkan pelatihan keterampilan seperti otomotif, bengkel, dan las. BLK sendiri juga mempunyai relasi dengan tempat kerja atau perusahaan-perusahaan yang dapat menampung para korban jika mempunyai keterampilan yang cukup bagus. Untuk tingkat keberhasilan penanganan masalah PMKS korban narkoba atau NAPZA di Kabupaten Blitar, Dinas Sosial Kabupaten Blitar menyebut masih rendah dikarenakan faktor umur para korban yang rata-rata masih remaja yang mempunyai pemikiran yang labil dan kurang matang. Selain itu lingkungan sosial, pengaruh teman, dan pengawasan orang tua yang kurang dapat mengembalikan para korban narkoba atau NAPZA kepada dunianya yang lalu.

Setelah proses pereduksian data, peneliti dapat menyajikan data dengan bagan sebagai berikut:



Setelah pereduksian data dan penyajian data, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk menangani masalah PMKS korban narkoba atau NAPZA sebagai fasilitator rehabilitasi dari TKSK dan LSM ke Balai Latihan Kerja (BLK) di Surabaya dan juga pembinaan mental & spiritual. Selain itu Dinas Sosial juga yang akan menyelesaikan laporan dan evaluasi kerja untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah, bahwasanya telah menjalankan program kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar.

## PENUTUP

### Simpulan

Dari penelitian dengan tema kesejahteraan sosial yang berjudul "Bagaimana Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS (studi kasus korban narkoba/NAPZA)" yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Blitar peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwasanya peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk menangani masalah PMKS korban narkoba atau NAPZA sebagai fasilitator rehabilitasi dari TKSK dan LSM ke Balai Latihan Kerja (BLK) di Surabaya dan juga pembinaan mental & spiritual. Selain itu Dinas Sosial juga yang akan menyelesaikan laporan dan evaluasi kerja untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah, bahwasanya telah menjalankan program kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar. Untuk pengidentifikasian dan pendataan korban narkoba atau NAPZA dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan masing-masing. Dan operator rehabilitasi dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di Surabaya, dengan cara pelatihan keterampilan seperti otomotif, bengkel dan las, serta pemberian alat kerja dan penyedia lapangan kerja.

## Saran

Dari kesimpulan yang didapat setelah proses analisis data, peneliti dapat memberikan saran untuk Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang dapat menjadikan acuan meningkatkan atau mengoptimalkan kinerjanya dalam mengatasi korban narkoba atau NAPZA, yaitu:

1. Menjadikan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai bagian dari Dinas Sosial, karena TKSK sebagai alat pencarian untuk Dinas Sosial dalam mengatasi masalah PMKS, selain itu TKSK juga yang paling mengetahui kondisi di lapangan sesungguhnya.
2. Memperbanyak relasi dengan LSM dan organisasi sosial lainnya untuk lebih pemeratakan bantuannya terhadap para korban PMKS. Selain itu memberikan bantuan juga kepada LSM dan organisasi sosial, baik secara materi atau logistik untuk peningkatan pelaksanaan tugastugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Angka Kemiskinan Kabupaten Blitar. Badan Pusat Statistika Kabupaten Blitar. diunduh pada <http://blitarkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/355>

Angka Penyandang Difabel Kabupaten Blitar. Badan Pusat Statistika Kabupaten Blitar. diunduh pada <http://blitarkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/410>

Charis Christiani, “Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang”, Fisipol UNTAG, Semarang. Diunduh pada <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/60>

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. 2015. “Jenis-jenis PMKS”. Diunduh pada : <http://dinsos.jogjapro.go.id/jenis-jenis-pmks/>

E-Book. 2013. “Panduan Pendataan PMKS-PSKS”. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Muhammad, Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Soekanto, Soerjono. 2007. “Sosiologi Suatu Pengantar”. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada

Sudarso, “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Surabaya”, FISIP Unair, Surabaya. Diunduh pada [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/PENYANDAN G%20MASALAH%20KESEJAHTERAAN%20OSIAL.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/PENYANDAN%20MASALAH%20KESEJAHTERAAN%20OSIAL.pdf)

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta